

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan perwujudan ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>1</sup> Pemilihan umum yang dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>2</sup> Dalam prakteknya Pemilu yang

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.

<sup>2</sup>Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 [http://kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_No.10.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/UU_No.10.pdf). Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 15.50 WIB.

dilakukan pada dewan perwakilan merupakan sebuah bentuk sarana kebebasan hak dalam memilih dan dipilih. Dewan perwakilan atau bisa disebut dengan legislatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan dalam pembuatan undang-undang. Lembaga ini terdiri dari DPD, DPR, dan MPR.

DPRD merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pencalonan anggota DPRD diusung melalui partai politik. Adapun fungsi dari lembaga legislatif adalah:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang, untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang *budget* dan anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.<sup>3</sup>

Pemberian hak sepenuhnya kepada masyarakat yang bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kebebasan kepada setiap warga negara agar mendapatkan kesetaraan. Disamping itu melalui kesetaraan ini, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

---

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo, 2014, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 322-323

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak isu gender dimasifkan pada awal 1977 di London, gerakan feminis mulai mempersoalkan kapan kaum perempuan menyingsingkan selimut dominasi kaum pria. Hak kesetaraan memang tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan politik di suatu negara. Dalam rangka memberikan hak kesetaraan penuh kepada warga negara, pemilihan legislatif merupakan wadah bagi setiap warga negara yang mau bersaing untuk mendapatkan kekuasaan tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan.

Berbicara tentang perempuan, merupakan salah satu fenomena menarik dalam kegiatan politik Indonesia yang tengah berkembang pada saat sekarang ini adalah keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik terutama pada legislatif. Keterlibatan perempuan pada bidang politik ini menjadi perbincangan dari berbagai kalangan karena anggapan selama ini perempuan dijadikan sebagai pelengkap dari laki-laki.<sup>4</sup>

Hal ini tentu memberikan warna baru bagi pola pelaksanaan Pemilu di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan calon

---

<sup>4</sup>Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai sendi kehidupan.

(Lihat pada: Muhammad Yusuf Pambudi. *Perempuan Dan Politik (Studi Tentang Akseibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang)*. Jurnal Pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.2013. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.

perempuan tentu memberikan semangat baru bagi lahirnya tokoh-tokoh politik baru yang diharapkan juga mampu memberikan pemikiran demi perubahan baru dalam pola pembangunan pada wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif memiliki kaitan erat dengan budaya pada daerah Sumatera Barat. Budaya ini mengakar sampai kedalam sistem politik, yang menjadikan laki-laki yang mendominasi untuk mendapatkan hak dan partisipasi politik. Budaya dan politik memiliki kaitan yang erat karena budaya yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut berpengaruh kepada kondisi politik. Oleh karena itu, budaya politik merupakan satu kesatuan dalam menjalankan sistem negara. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik yang demokratis menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.<sup>5</sup>

Beberapa partai politik ikut serta dalam pemilu legislatif Kota Padang pada periode 2009-2014. Kota Padang memiliki beberapa partai besar yang pamor kepartaiannya cukup dikenal ketika pemilu legislatif di Kota Padang. Lima partai besar tersebut diantaranya Demokrat, Gerindra, PKS, PDIP, dan Golkar. Demokrat mampu mewakilkan dua orang calon legislatif (Caleg) perempuannya untuk duduk di lembaga legislatif Kota Padang, dan PKS hanya mampu

---

<sup>5</sup>Lihat Estika Sari, *Orientasi Kognitif Dan Harapan Perempuan Etnis Tionghoa Kota Padang Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=101265&val=1511>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2017

mewakiliikan satu orang Caleg perempuannya. Pada pemilu 2014-2019, Gerindra, PPP dan Hanura mampu mewakiliikan dua orang Caleg perempuannya untuk duduk di lembaga legislatif Kota Padang, sedangkan Demokrat mampu mewakiliikan satu orang caleg perempuan yang dulunya juga merupakan Caleg pada pemilihan legislatif periode 2009-2014. Jika melihat latar belakang Nasdem dan Gerindra yang merupakan partai muda di dunia partai politik di Indonesia, partai tersebut mampu mewakiliikan dua orang anggota perempuan partai mereka duduk di parlemen dan mampu mengalahkan Demokrat yang di klaim sebagai partai besar dan memiliki pamor kepertaian yang dikenal baik di kalangan masyarakat.

Kota Padang menjadi salah satu kota yang ada di Indonesia dan merupakan Ibu Kota dari Sumatra Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau. Suku ini memiliki unsur kekerabatan matrilineal, masyarakat di Minangkabau cenderung lebih mendahulukan kaum pria untuk menjadi pemimpin. Menurut Schneider dalam masyarakat matrilineal pemilik properti adalah perempuan, sedangkan pemilik otoritas adalah laki-laki. Pemimpin selalu dikaitkan dengan laki-laki. Otoritas tradisional adalah laki-laki. Sebuah paruik (Sub-garis keturunan) dipimpin oleh tungganai, kaum (garis keturunan) dipimpin oleh panghulu andiko (kepala penghulu), suku (klan) dipimpin oleh panghulu pucuak, dan nagari (desa) dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (dewan musyawarah adat) yang mewakili semua panghulu di nagari. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pria selalu tampil

di semua front dimana pengambilan keputusan berlangsung.<sup>6</sup> Posisi penghulu di minang sangat tinggi dan segala keputusan diputuskan oleh penghulu. Posisi perempuan di Minang selalu berada di belakang kaum laki-laki. Budaya patriarki seperti mengakar dalam kehidupan lokal sebab budaya muncul karena adanya kebiasaan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Budaya patriarki menjadikan perempuan akan selalu dikuasai oleh laki-laki padahal potensi perempuan juga sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kebiasaan ini tentu akan merugikan kaum perempuan, bahwa ada hak-hak yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan, misalnya hak untuk bisa mendapatkan posisi yang sama dalam bidang politik.

Kepercayaan dan nilai patriarki di Minangkabau dapat dikatakan menjadi salah satu pengaruh terhadap kaum perempuan untuk ikut bersaing dalam ranah politik. Salah satu persaingan perempuan di ranah politik yang terlihat jelas yaitu Gustin Pramona sebagai legislator perempuan yang mampu bertahan pada dua periode di pemilihan legislatif Kota Padang. Penelitian ini akan fokus membahas tentang analisis kemenangan Gustin Pramona yang merupakan salah satu kandidat perempuan Minangkabau khususnya di Kota Padang yang memenangkan dua periode pemilihan legislatif yaitu pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Gustin Pramona merupakan anggota legislatif yang berasal dari partai Demokrat

---

<sup>6</sup>Jendrius, 2017, *Women In Minangkabau Nagari Government: Gender, Negotiating And Power At The Local Level*, Bukittinggi: CV. Rumah kayu Pustaka Utama. Hal: 27

yang mampu bersaing dengan memenangkan dua periode. Dilihat pada periode 2009-2014, perwakilan yang berasal dari anggota legislatif perempuan menurun menjadi 3 (tiga) orang. Selanjutnya pada periode 2014-2019 terdapat peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 7 (tujuh) orang dengan tercantum nama Gustin Pramona didalamnya. Kemenangan Gustin Pramona merupakan bukti bahwa strategi dan *marketing* politik yang digunakan dapat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik.

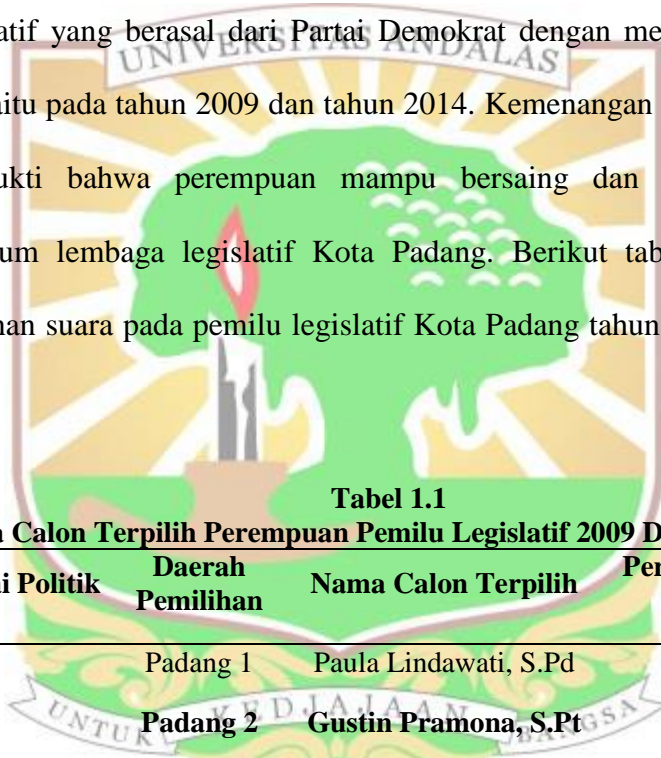
## 1.2 Rumusan Masalah

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang ada di Minangkabau. Kota Padang juga tidak terlepas dari unsur budaya patriarki yang telah mengakar kepada masyarakat yang ada di Kota Padang. Budaya patriarki ini merupakan kepercayaan terhadap laki-laki yang mampu menjadi pengambil keputusan maupun pemimpin dan dapat mewakili keputusan kaum perempuan. Perwakilan di lembaga legislatif merupakan sebuah bentuk atau wadah untuk membuat sebuah kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan amanat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap warga memiliki kesamaan hak politik dan kedudukan tanpa membedakan suku, agama, maupun jenis kelamin. Tujuannya agar terdapat kesetaraan hak dalam politik tanpa membedakan-bedakan. Budaya patriarki selalu menjadi penghambat perempuan dalam keterwakilan politik khususnya di lembaga legislatif Kota Padang. Dampak dari budaya patriarki terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilegalkan selalu

membuat keberpihakan berada pada kaum laki-laki. Implementasi dari kebijakan yang hanya memihak terhadap kaum laki-laki. Kesenjangan yang terdapat di lembaga legislatif seperti DPRD Kota Padang bukan hanya berdasarkan dari para pemilihnya, kesenjangan ini juga berasal dari para calon keterwakilan politik yang berjenis kelamin perempuan.

Anggota legislatif di Kota Padang yaitu Gustin Pramona, S.Pt, merupakan anggota legislatif yang berasal dari Partai Demokrat dengan memenangkan dua kali periode yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2014. Kemenangan Gustin Pramona merupakan bukti bahwa perempuan mampu bersaing dan bertarung pada pemilihan umum lembaga legislatif Kota Padang. Berikut tabel data tentang jumlah perolehan suara pada pemilu legislatif Kota Padang tahun 2009 per daerah pemilihan.



**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Calon Terpilih Perempuan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Padang**

<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Nama Calon Terpilih</b>	<b>Perolehan Suara Caleg</b>
Demokrat	Padang 1	Paula Lindawati, S.Pd	2.142
<b>Demokrat</b>	<b>Padang 2</b>	<b>Gustin Pramona, S.Pt</b>	<b>1.969</b>
PKS	Padang 5	Rahayu Purwanti, Sp	1.276

*Sumber: KPU Kota Padang*

Dari tabel di atas di lihat terdapat tiga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Padang. Perolehan suara tertinggi di peroleh oleh Paula Lindawati, S.Pd yang berasal dari partai Demokrat mendapatkan perolehan suara 2.142 di daerah pemilihan (dapil) satu dan perolehan suara tertinggi kedua di peroleh oleh Gustin Pramona, S.Pt yang berasal dari partai Demokrat mendapatkan perolehan



suara 1.969 di dapil dua Selanjutnya Rahayu Purwanti, Sp yang berasal dari PKS dengan perolehan suara 1.276 di dapil lima.

Berkaca dari periode sebelumnya terdapat enam orang anggota legislatif perempuan terpilih, sedangkan pada pemilu legislatif periode 2009 hanya terdapat tiga orang anggota legislatif terpilih di Kota Padang. Hal ini merupakan sebuah bentuk penurunan keterpilihan calon legislatif perempuan untuk duduk di DPRD Kota Padang. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif Kota Padang terlihat kembali pada saat periode 2014 yaitu sebanyak tujuh orang anggota legislatif perempuan. Berikut nama calon legislatif perempuan terpilih pada Pemilu legislatif Kota Padang tahun 2014:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama Calon Terpilih Perempuan Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Padang**

<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Nama Calon Terpilih</b>	<b>Perolehan Suara Caleg</b>
Nasdem	Dapil 1	Mailinda Rose, Se	1.807
<b>Demokrat</b>	<b>Dapil 1</b>	<b>Gustin Pramona, S.Pt</b>	<b>1.391</b>
PPP	Dapil 1	Yuhilda Darwis, Se	2.653
Nasdem	Dapil 2	Dian Anggraini Oktavia, S.Sos, M.S	1.101
Gerindra	Dapil 3	Elly Thrisyanti, Se, Akt	1.549
Gerindra	Dapil 3	Dewi Susanti	2.462
PPP	Dapil 3	Nila Kartika, A.Md	1.242

*Sumber: KPU Kota Padang*

Berdasarkan tabel diatas terdapat tujuh nama calon legislatif perempuan terpilih di Kota Padang. Dapil satu di Kecamatan Koto Tangah terdapat tiga nama calon terpilih dengan partai berbeda yaitu Mailinda Rose dengan perolehan 1.807

suara berasal dari partai Nasdem, nama Gustin Pramona mendapatkan perolehan 1.391 suara berasal dari Partai Demokrat dan Yuhilda Darwis Susanti dengan 2.653 suara berasal dari PPP. Dapil 2 (dua) di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh terdapat nama Dian Anggraini Oktavia dengan perolehan 1.101 suara yang berasal dari Partai Nasdem. Dan pada dapil 3 (tiga) di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, dan Bungus Teluk Kabung terdapat tiga nama dengan dua nama yang berasal dari partai sama yaitu Elly Thrisyanti dengan perolehan 1.549 suara yang berasal dari Partai Gerindra dan Dewi Susanti dengan perolehan 2.462 suara. Terakhir Nila Kartika dari PPP mendapatkan 1.242 suara. Menurut Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu KPU Kota Padang, M Sjahbana Sjams.

“Berdasarkan daftar calon legislatif sementara yang telah di terima KPU, 540 bakal calon yang diusung 12 partai politik tersebut tersebut terdiri atas 356 pria dan 185 perempuan.”<sup>7</sup>

Dilihat dari tabel hasil perolehan suara diatas, tercantum kembali nama Gustin Pramona sebagai calon legislatif perempuan terpilih di pemilu legislatif Kota Padang. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan sosok Gustin Pramona sebagai calon legislatif *incumbent*. Menariknya lagi pada periode 2014, Gustin Pramona merupakan salah satu dari empat Caleg *incumbent* yang terpilih di daerah pemilihan satu, dengan perolehan suara 1.391 suara. Gustin Pramona mengalahkan tiga pesaing dari Partai Demokrat didapil satu pada tahun 2014. Berikut tabel perolehan suara caleg *incumbent* pada dapil satu.

---

<sup>7</sup>Lihat Sumbar.antaranews.com. 540 Bacaleg Perebutkan 45 Kursi di Padang.  
<http://sumbar.antaranews.com/berita/34887/540-bacaleg-perebutkan-45-kursi-di-padang.html>  
Diakses pada tanggal 15 mei 2017 pukul 14.34

**Tabel 1.3**  
**Daftar Nama Calon Legislatif Incumbent Berasal Dari**  
**Partai Demokrat Pada Dapil Satu**

No.	Nama	Hasil Perolehan Suara
1	Gustin Pramona	1.391
2	Azwar Siry	831
3	Roni Candra	1.374
4	Syamsu Sulin	542

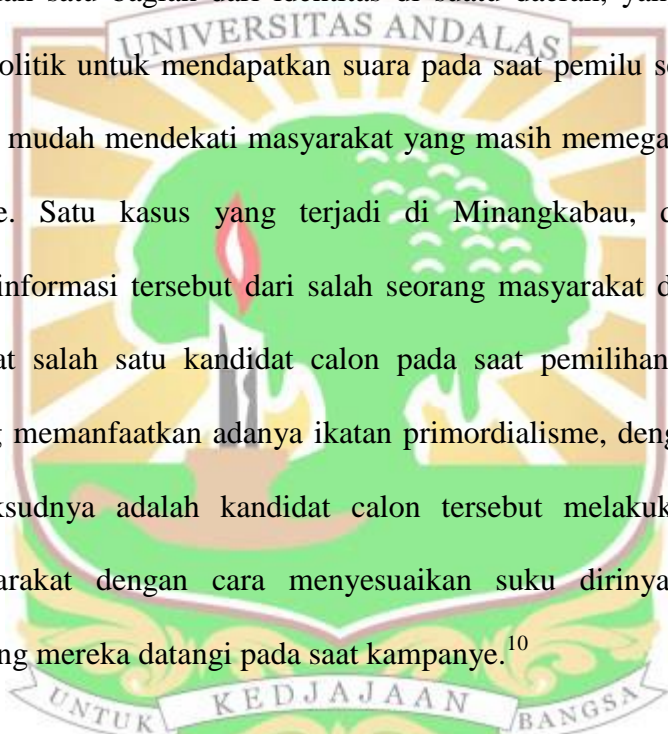
*Sumber: KPU Kota Padang*

Dapil satu Partai Demokrat terdapat empat Caleg *incumbent*, diantaranya Gustin Pramona dengan perolehan 1.391 suara, Azwar Siry 831 suara, Roni Candra 1.374 suara, dan Syamsu Sulin dengan 542 suara. Jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di dapil satu mencapai 7.336 suara atau 2,17 persen. Dari tiga orang tersebut hanya satu kursi diraih Demokrat atas nama Gustin Pramona.<sup>8</sup> Gustin Pramona merupakan calon legislatif perempuan yang dapat mengalahkan tiga calon *incumbent* berasal dari partai Demokrat. Gustin Pramona mengalahkan Roni Chandra dengan selisih 71 suara, selain itu Gustin Pramona juga dapat mengalahkan Azwar Sirry yang pada periode sebelumnya memiliki perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihannya yaitu 6.203 suara. Hal ini merupakan bukti bahwa Gustin Pramona sebagai caleg perempuan mampu meraih kepercayaan masyarakat Koto Tengah dalam pemilihan legislatif Kota Padang.

Selain itu, yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk mengkaji tentang Gustin Pramona yaitu merupakan caleg perempuan yang berasal dari daerah

<sup>8</sup>Lihat JPNN.COM. *Hanya 18 Caleg Incumbent Lolos*. <http://www.jpnn.com/news/hanya-18-caleg-incumbent-lolos> Di akses pada tanggal 17 April 2017 pukul 20:11 WIB.

Kabupaten Solok. Modal sosial yang dimiliki caleg perempuan juga menjadi persoalan tersendiri ketika perempuan tidak membangun relasi yang baik dengan konstituennya di daerah pemilihan.<sup>9</sup> Ini merupakan bentuk keterbatasan didalam masa kampanye bagi seorang caleg perempuan untuk berkoperitisi. Didalam kajian perilaku memilih, ikatan primordial juga salah satu pengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Ikatan primordialisme merupakan salah satu bagian dari identitas di suatu daerah, yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan suara pada saat pemilu sehingga elit-elit politik dengan mudah mendekati masyarakat yang masih memegang teguh ikatan primordialisme. Satu kasus yang terjadi di Minangkabau, dimana penulis mendapatkan informasi tersebut dari salah seorang masyarakat di Minangkabau bahwa terdapat salah satu kandidat calon pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang memanfaatkan adanya ikatan primordialisme, dengan cara seperti bunglon. Maksudnya adalah kandidat calon tersebut melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan suku dirinya dengan suku masyarakat yang mereka datangi pada saat kampanye.<sup>10</sup>



Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti jelaskan di latar belakang, penelitian ini melihat tentang strategi Gustin Pramona dalam pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 di Kota Padang. Oleh karena itu peneliti

---

<sup>9</sup>Lihat Moeis Isnarmi, *70 Tahun Indonesia Merdeka (Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)*, UNP Press.  
<http://repository.unp.ac.id/446/1/NURMAN%20S%2C%20AL%20RAFNI.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018

<sup>10</sup>Lihat Hestixia Retfi, dkk. *Pengaruh Ikatan Primordialisme Terhadap Perilaku Memilih Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kecamatan Gunung Talang Tahun 2015*,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/33206/20054>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018

merumuskan permasalahan dalam suatu rumusan masalah yaitu: “Apa faktor penyebab kemenangan Gusti Pramona dalam pemilihan legislatif Kota Padang pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab kemenangan Gusti Pramona dalam pemilihan legislatif Kota Padang pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

### **1.4 Signifikasi Penelitian**

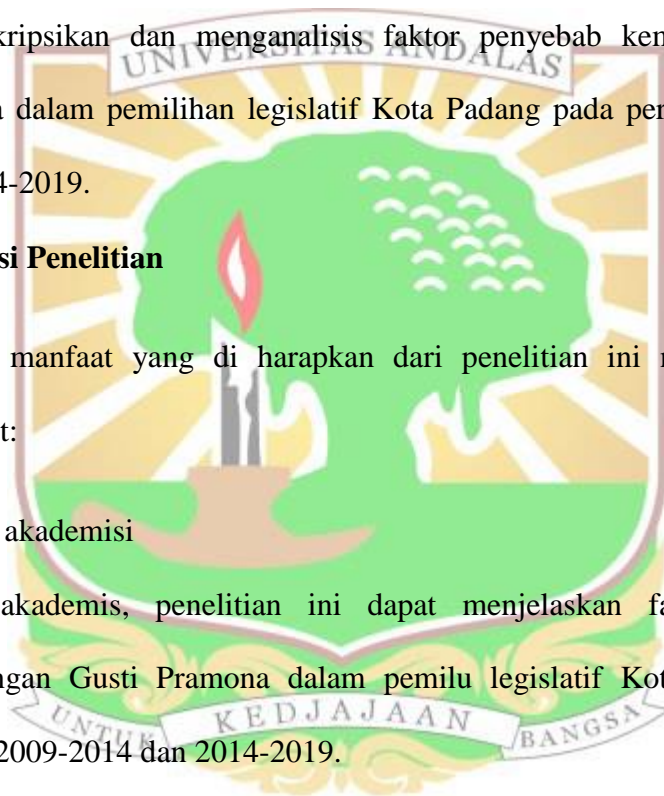
Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat akademisi**

Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan faktor penyebab kemenangan Gusti Pramona dalam pemilu legislatif Kota Padang pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

#### **2. Manfaat teknis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi kandidat perempuan, partai-partai dan tim sukses dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif.



### 3. Secara sosial

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih seorang calon pada pemilihan umum.

